

## HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN DUKUNGAN PEMERINTAH DESA TERHADAP KEPEMILIKAN JAMBAN DI WILAYAH PESISIR WILAYAH KERJA PUSKESMAS ELPAPUTIH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Rusli Karepesina<sup>1\*</sup>, Tiwi Yuniastuti<sup>2</sup>, Misbahul Subhi<sup>3</sup>

Program Studi S1 Kesehatan Lingkungan, Jurusan Kesehatan Lingkungan, Stikes Widyagama Husada Malang<sup>1,2,3</sup>

\*Corresponding Author : ruslikarepesina@gmail.com

### ABSTRAK

Sanitasi yang layak dan ketersediaan jamban yang memadai merupakan indikator penting dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Namun, masalah sanitasi masih menjadi tantangan di wilayah pesisir, termasuk di wilayah kerja Puskesmas Elpaputih, di mana masih banyak masyarakat yang melakukan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di pantai. Tingkat pengetahuan yang rendah dan dukungan yang belum maksimal dari pemerintah desa seringkali menjadi kendala utama dalam kepemilikan jamban sehat. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan dan dukungan pemerintah desa terhadap kepemilikan jamban di wilayah pesisir wilayah kerja Puskesmas Elpaputih Kabupaten Seram Bagian Barat. Desain Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian *cross-sectional*. Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 90 responden yang dipetoleh melalui teknik pengambilan sampel *random sampling*, dimana untuk menjaga relevansi data responden harus ada kriteria Inklusi yang sudah ditetapkan. Prosedur pengumpulan data diperoleh melalui wawancara menggunakan kuesioner sebagai data primer dan data yang diperoleh secara tidak langsung dari data laporan rutin puskesmas elpaputih sebagai data sekunder. Data di analisis menggunakan SPSS dengan tahapan analisis univariat dan analisis bivariat melalui uji *Chi Square*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan kepemilikan jamban ( $p\text{-value} = 0,678$ ). Sementara itu terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan pemerintah desa terhadap kepemilikan jamban ( $p\text{-value} = 0,046$ ). Dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat yang sudah baik tidak berkorelasi signifikan dengan kepemilikan jamban, namun dukungan pemerintah desa yang dinilai kurang optimal memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepemilikan jamban di wilayah tersebut.

**Kata kunci** : dukungan pemerintah desa, kepemilikan jamban, tingkat pengetahuan, wilayah pesisir

### ABSTRACT

*Proper sanitation and adequate latrine availability are important indicators in achieving optimal public health. The aim of this study was to analyze the relationship between knowledge level and village government support with latrine ownership in the coastal area under the working area of Elpaputih Community Health Center, West Seram Regency. This study employed a quantitative method with a cross-sectional design. The total number of respondents was 90, selected through random sampling, with inclusion criteria established to ensure data relevance. Data collection procedures were conducted through interviews using questionnaires as primary data, and indirectly through routine reports from Elpaputih Community Health Center as secondary data. Data were analyzed using SPSS with univariate analysis and bivariate analysis through the Chi-Square test. The results showed no significant relationship between knowledge level and latrine ownership ( $p\text{-value} = 0.678$ ). Meanwhile, there was a significant relationship between village government support and latrine ownership ( $p\text{-value} = 0.046$ ). It can be concluded that although the community's knowledge level was relatively good, it did not significantly correlate with latrine ownership. However, village government support, which was considered less optimal, had a significant relationship with latrine ownership in the area.*

**Keywords** : village government support, latrine ownership, knowledge level, coastal area

## PENDAHULUAN

Kepemilikan jamban merupakan ketersediaan jamban keluarga disetiap kepala keluarga dan cara penggunaan atau pemakaian jamban dalam hal buang air besar yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang sehat. Dimulai dari bagaimana masyarakat mengetahui pengertian jamban, syarat jamban sehat hingga cara pemeliharaan jamban secara partisipasi aktif masyarakat memanfaatkannya (Gargita, 2020). Jamban sehat merupakan fasilitas sanitasi keluarga yang wajib dimiliki oleh semua rumah tangga. Setiap hari manusia membuang kotorannya sehingga jika tidak di tampung dengan baik akan menyebabkan berbagai macam penyakit. Sanitasi yang buruk tentunya akan berdampak negatif di banyak aspek kehidupan. Dampak sanitasi yang buruk meliputi turunnya kualitas lingkungan hidup, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya kejadian diare dan munculnya beberapa penyakit (Wirdawati, 2021). Kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan jamban sehat berakar pada rendahnya tingkat pengetahuan yang dimiliki, sehingga pemahaman bersama mengenai pentingnya praktik buang air besar yang aman dan higienis belum terbentuk secara maksimal (Sari, 2020). Selain itu Safriani (2020), mengemukakan ketersediaan sarana sanitasi yang memadai ternyata belum mampu menjadi katalisator perubahan perilaku, karena tanpa pemahaman dan dorongan internal, fasilitas fisik tidak serta-merta mendorong adopsi kebiasaan sanitasi yang berkelanjutan.

Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan merupakan bagian integral dari pilar pertama STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) yang saat ini sedang dilaksanakan. Program ini ditargetkan rampung sebelum tahun 2030, seiring dengan upaya pencapaian indikator nasional lainnya dalam STBM. Salah satu capaian strategis yang ditetapkan adalah keterlibatan 50% kepala keluarga dalam penerapan kelima pilar STBM secara komprehensif pada tahun 2024 (Direktorat Kesehatan Lingkungan 2024). Jamban keluarga merupakan sarana pembuangan sampah yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit (Nahrin, Kuswary, & Nur, 2024). Sejalan dengan penelitian di atas Mukhlisin & Solihudin (2020), menyatakan bahwa Jamban sehat merupakan salah satu bentuk sanitasi dasar yang seharusnya tersedia di setiap rumah tangga. Rendahnya tingkat kepemilikan jamban berisiko mendorong kebiasaan buang air besar sembarangan di tempat terbuka seperti sungai, kolam, sawah, dan lingkungan sekitar. Praktik ini berpotensi mencemari sumber air dan lingkungan hidup, serta meningkatkan risiko penyebaran berbagai agen penyebab penyakit.

Pengetahuan masyarakat merupakan faktor internal yang dapat memengaruhi perilaku sanitasi. Kurangnya pemahaman mengenai risiko kesehatan akibat praktik BABS menyebabkan rendahnya motivasi untuk memiliki jamban sehat (Agustyaningsih, Kurnia & Larasati, 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mila, Aryana, & Rusminingsih, (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Hasil uji chi square menunjukkan terdapat hubungan tingkat pengetahuan dengan kepemilikan jamban sehat (nilai  $p = 0,000 < 0,05$ ) dan tingkat hubungan sedang ( $CC = 0,585$ ). Di sisi lain, menurut Putri (2024) dukungan pemerintah desa sebagai faktor eksternal sangat diperlukan dalam menyediakan kebijakan, anggaran, dan fasilitas penunjang bagi masyarakat. Tanpa sinergi antara pengetahuan masyarakat dan peran aktif pemerintah desa, capaian pilar pertama STBM sulit untuk tercapai secara optimal.

Secara umum, sanitasi lingkungan di Indonesia belum mencapai kondisi yang memadai. Kebutuhan sanitasi dasar belum tercapai, seperti pembangunan tempat pembuangan kotoran manusia (Boys, 2020). Pranaka dan Agustinus (2022) Tantangan kesehatan lingkungan masih menjadi persoalan mendasar di Indonesia, khususnya dalam upaya memenuhi indikator rumah sehat. Hal ini mencakup tersedianya jamban yang memenuhi standar kelayakan, akses terhadap air minum yang aman, serta sistem pengelolaan limbah domestik yang efektif. Ketiadaan atau keterbatasan fasilitas jamban sehat berkontribusi langsung terhadap perilaku sebagian

masyarakat yang masih melakukan buang air besar di tempat terbuka atau dengan cara yang tidak memenuhi kaidah sanitasi. peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan jamban tidak dapat dicapai secara optimal tanpa adanya kolaborasi lintas sektor, terutama dalam hal edukasi dan penyediaan informasi yang mudah diakses.

Wilayah pesisir memiliki tantangan tersendiri dalam hal pengadaan sarana sanitasi. Faktor geografis seperti kondisi tanah berpasir, tergenang air laut, hingga letak permukiman yang terpencar menyebabkan pembangunan jamban menjadi lebih kompleks. Selain itu, faktor sosial budaya turut memengaruhi rendahnya kepemilikan jamban. Masih banyak masyarakat yang menganggap jamban sebagai hal sekunder, atau bahkan mempraktikkan BABS sebagai hal yang wajar karena faktor kebiasaan turun-temurun. Bagi sebagian masyarakat pesisir, laut atau sungai merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka (Nanda et al. 2025). Kebiasaan buang air besar sembarangan di laut atau sungai sudah menjadi kebiasaan yang sering dianggap praktis dan efisien. Untuk mengubah kebiasaan ini jauh lebih sulit. Hal ini bukan hanya tentang membangun jamban, tetapi tentang bagaimana merubah kesadaran, memberdayakan komunitas dan menyediakan Solusi yang betul-betul relevan dengan kehidupan di daerah pesisir (Susilawati et al, 2023).

Salah satu faktor utama rendahnya kepemilikan jamban adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya sanitasi, pendapatan keluarga, serta tingkat pendidikan. Disisi lain sebagian masyarakat tidak memahami hubungan antara sanitasi buruk dan peningkatan risiko penyakit menular. Mereka juga tidak mengetahui standar jamban sehat atau cara membangunnya dengan bahan atau sederhana (Wijayanti & Maulana, 2019). Selain itu studi yang dilakukan oleh Widyastuti et al (2023) menyatakan bahwa penyelesaian pendidikan hingga jenjang SMA atau yang setara, serta kepemilikan jamban pribadi, secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak. Sebaliknya, tingginya proporsi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan justru berdampak negatif terhadap akses tersebut. Namun, pengetahuan yang baik saja tidak cukup. Diperlukan dukungan dari pemerintah desa dalam bentuk kebijakan, penyediaan anggaran, pembangunan infrastruktur, dan fasilitasi perubahan perilaku masyarakat.

Pemerintah desa memiliki kontribusi yang signifikan dalam pelaksanaan Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Peran tersebut mencakup berbagai tahapan strategis, mulai dari kegiatan sosialisasi kepada masyarakat hingga fasilitasi bantuan pembangunan jamban bagi keluarga yang tergolong kurang mampu. Keterlibatan aktif pemerintah desa menjadi elemen kunci dalam mendorong perubahan perilaku dan memperluas cakupan akses sanitasi layak di tingkat local (Nihaya, Wulandari, dan Sugiono, 2024). Sementara penelitian yang dilakukan oleh Tiak et.al (2024) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara peran pemerintah kelurahan dan kepemilikan jamban, dengan nilai p sebesar 0,029 (<0,05), mengindikasikan bahwa dukungan dan keterlibatan aktif dari pihak kelurahan berkontribusi positif terhadap peningkatan kepemilikan jamban di masyarakat.

Secara umum Kabupaten Seram Bagian Barat, termasuk didalamnya Kecamatan Elpaputih terus berbenah dan berupaya untuk meningkatkan akses terhadap sanitasi layak dalam hal ini tidak lagi melakukan praktik buang air besar sembarangan. Wilayah kerja Puskesmas Elpaputih mencakup 7 Desa, dimana 3 Desa berada di wilayah pesisir dan 4 desanya berada di wilayah pegunungan. Berdasarkan laporan rutin sanitarian bulan juni 2025 capain akses sanitasi dimana dari 3 desa yang berada di Daerah pesisir yang dijadikan Lokasi penelitian cuma satu Desa yaitu desa Wasia yang sudah dinyatakan Desa stop BABS, sementara Desa Elpaputih dan Desa Sanahu belum masuk dalam kategori Desa Stop BABS karena masih terdapat masyarakat yang melakukan praktik buang air besar sembarangan. Terlihat juga terkait dengan kepemilikan jamban Desa Elpaputih dengan jumlah kepala keluarga yang memiliki jamban sehat sebanyak 423 dari total kepala keluarga 530, Desa Sanahu dengan jumlah kepala keluarga yang memiliki jamban sehat sebanyak 113 dari total kepala keluarga 301, sedangkan Desa Wasia dengan

jumlah kepala keluarga yang memiliki jamban sehat sebanyak 84 dari total kepala keluarga 84, Desa Sumeith pasinaro dengan jumlah kepala keluarga yang memiliki jamban sehat sebanyak 52 dari total kepala keluarga 64, Desa Ahiolo Abio dengan jumlah kepala keluarga yang memiliki jamban sehat sebanyak 178 dari total kepala keluarga 237, Desa Huku kecil dengan jumlah kepala keluarga yang memiliki jamban sehat sebanyak 43 dari total kepala keluarga 89, Desa watui dengan jumlah kepala keluarga yang memiliki jamban sehat sebanyak 14 dari total kepala keluarga 19 (Puskesmas Elpaputih, 2024).

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari penanggung jawab Sanitarian Puskesmas Elpaputih pada tahun 2024 bahwa praktik buang air besar sembarangan (BABS) di wilayah Elpaputih terutama disebabkan oleh ketidaktersediaan sarana sanitasi dasar, baik berupa jamban pribadi maupun jamban umum/komunal yang seharusnya disediakan oleh pemerintah desa. Ketidadaan fasilitas ini membuat masyarakat tidak memiliki pilihan selain melakukannya di ruang terbuka seperti pantai atau hutan di sekitar rumah. Secara ilmiah, kondisi tersebut mencerminkan adanya defisit infrastruktur sanitasi yang menjadi determinan langsung perilaku BABS. Faktor ekonomi juga berperan karena pembangunan jamban pribadi membutuhkan biaya yang tidak semua rumah tangga mampu menanggung, sehingga ketergantungan pada sarana komunal atau praktik terbuka tetap tinggi. Selain itu, faktor lingkungan turut memengaruhi karena pantai dan hutan dianggap sebagai tempat yang aman dan wajar untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, meskipun secara epidemiologis hal ini meningkatkan risiko kontaminasi tanah, air, dan pangan yang dapat memicu penyakit berbasis lingkungan seperti diare dan cacangan.

Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Dukungan Pemerintah Desa Terhadap Kepemilikan jamban di Wilayah Pesisir Wilayah Kerja Puskesmas Elpaputih Kecamatan Elpaputih Kabupaten Seram Bagian Barat”. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan dan dukungan pemerintah desa terhadap kepemilikan jamban di wilayah pesisir wilayah kerja Puskesmas Elpaputih Kabupaten Seram Bagian Barat

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian *cross-sectional*. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Kepala Keluarga yang berdomisili di wilayah pesisir wilayah kerja puskesmas elpaputih sebanyak 915 kepala keluarga, dengan sampel sebanyak 90 kepala keluarga. Penelitian ini dilakukan di wilayah pesisir wilayah kerja Puskesmas Elpaputih pada bulan november - desember 2025. Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan yaitu analisis univariat dan analisis bivariat dengan Uji Chi Square. Penelitian ini sudah memperoleh sertifikat etik dari komite etik Stikes Widyagama Husada Malang dengan nomor 1796/A-1/Stikes/XII/2025.

## HASIL

### Karakteristik Responden

**Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden di Wilayah Pesisir Wilayah Kerja Puskesmas Elpaputih Tahun 2024**

No	Karakteristik Responden	n	%
1	Usia		
	18-30	41	45,6
	31-50	47	52,2
	Lebih dari 50 Tahu	2	2,2

	<b>Jumlah</b>	<b>90</b>	<b>100</b>
2	<b>Jenis Kelamin</b>		
	Laki-laki	88	97,8
	Perempuan	2	2,2
	<b>Jumlah</b>	<b>90</b>	<b>100</b>
3	<b>Pendidikan Terakhir</b>		
	Tidak Sekolah	3	3,3
	SD	15	16,7
	SMP	27	30,0
	SMA	44	48,9
	Diploma	0	0
	Sarjana	1	1,1
	<b>Jumlah</b>	<b>90</b>	<b>100</b>
4	<b>Pekerjaan</b>		
	Petani	84	93,3
	Nelayan	0	0
	Pedagang	3	3,3
	Pelajar	0	0
	Pegawai Swasta	0	0
	TNI/Polri	0	0
	ASN	1	1,1
	Ibu Rumah Tangga	2	2,2
	<b>Jumlah</b>	<b>90</b>	<b>100</b>
5	<b>Lama Tinggal</b>		
	Kurang dari 1 tahun	90	90
	Lebih dari 1 tahun	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>90</b>	<b>100</b>
6	<b>Pendapatan</b>		
	< 1 Juta	31	34,4
	1 Juta – 3 Juta	59	65,6
	> 3 Juta	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>90</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa karakteristik responden di wilayah pesisir wilayah kerja Puskesmas Elpaputih Tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar berada pada kelompok usia produktif, yaitu 31–50 tahun (52,2%) dan 18–30 tahun (45,6%), sedangkan yang berusia lebih dari 50 tahun hanya 2,2%. Responden didominasi oleh laki-laki (97,8%) dengan latar belakang pendidikan terakhir mayoritas SMA/ sederajat (48,9%) dan SMP/ sederajat (30,0%), sementara sebagian kecil berpendidikan SD/ sederajat (16,7%), tidak sekolah/ tidak tamat SD (3,3%), serta sarjana (1,1%). Pekerjaan utama responden adalah petani (93,3%), dengan sebagian kecil bekerja sebagai pedagang (3,3%), ASN (1,1%), dan ibu rumah tangga (2,2%). Seluruh responden telah tinggal di wilayah tersebut lebih dari satu tahun (100%), yang menunjukkan keterikatan komunitas dengan lingkungan pesisir. Dari segi ekonomi, mayoritas responden memiliki pendapatan antara Rp1–3 juta (65,6%), sedangkan sisanya berpenghasilan  $\leq$  Rp1 juta (34,4%), dan tidak ada yang berpenghasilan lebih dari Rp3 juta.

### Analisis Univariat Tingkat Pengetahuan

**Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pengetahuan di Wilayah Kerja Puskesmas Elpaputih**

No	Tingkat Pengetahuan	n	%
1	Baik	89	98,9
2	Kurang Baik	1	1,1

Total	90	100
-------	----	-----

Berdasarkan tabel 2 distribusi frekuensi responden berdasarkan tingkat pengetahuan diperoleh total sebanyak 90 tingkat pengetahuan. Kategori tingkat pengetahuan baik 89 responden dengan persentase 98,9%, kategori tingkat pengetahuan kurang baik 1 responden dengan persentase 1,1%. sehingga dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi tingkat pengetahuan responden tertinggi yaitu pada kategori baik sebanyak 89 dengan persentase 98,9%.

### Dukungan Pemerintah Desa

**Tabel 3. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Dukungan Pemerintah Desa di Wilayah Kerja Puskesmas Elpaputih**

No	Dukungan Pemerintah Desa	n	%
1	Mendukung	28	31,1
2	Kurang Mendukung	62	68,9
<b>Total</b>		<b>90</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 3 distribusi frekuensi responden berdasarkan dukungan pemerintah desa diperoleh total sebanyak 90 dukungan pemerintah desa. Kategori dukungan pemerintah desa mendukung 28 responden dengan persentase 31,1%, kategori dukungan pemerintah desa kurang mendukung 62 responden dengan persentase 68,9%. sehingga dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi dukungan pemerintah desa responden tertinggi yaitu pada kategori kurang mendukung sebanyak 62 dengan persentase 68,9%.

### Kepemilikan Jamban

**Tabel 4. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kepemilikan Jamban di Wilayah Kerja Puskesmas Elpaputih**

No	Kepemilikan Jamban	n	%
1	Memiliki	61	67,8
2	Tidak Memiliki	29	32,2
<b>Total</b>		<b>90</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 4 distribusi frekuensi responden berdasarkan kepemilikan jamban diperoleh total sebanyak 90. Kategori memiliki jamban 61 responden dengan persentase 67,8%, kategori tidak memiliki jamban 29 responden dengan persentase 32,2%. sehingga dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi kepemilikan jamban oleh responden tertinggi yaitu pada kategori memiliki jamban 61 dengan persentase 67,8%.

### Analisis Bivariat

**Tabel 5. Hubungan antara Tingkat Pengetahuan dengan Kepemilikan Jamban**

No	Tingkat Pengetahuan	Kepemilikan Jamban				Signifikansi
		Ada		Tidak Ada		
		n	%	n	%	
1	Baik	60	67,4	29	32,6	0,678
2	Kurang Baik	1	100	0	0,0	
<b>Total</b>		<b>61</b>	<b>67,8</b>	<b>29</b>	<b>32,2</b>	

Tabel 5 menunjukkan responden yang memiliki tingkat pengetahuan baik lebih banyak pada ada kepemilikan jamban (67,4%), daripada kelompok yang tidak ada kepemilikan jamban

(32,6%). Hasil uji Chi Square menunjukkan tidak ada hubungan tingkat pengetahuan dengan kepemilikan jamban dengan nilai signifikansi 0,678 ( $\alpha = 0,05$ ).

**Tabel 6. Hubungan antara Dukungan Pemerintah Desa dengan Kepemilikan Jamban**

No	Dukungan Pemerintah Desa	Kepemilikan Jamban		Signifikansi		
		Ada	Tidak Ada			
		n	%	n	%	
1	Mendukung	15	53,6	13	46,4	0,046
2	Kurang Mendukung	46	74,2	16	25,8	
<b>Total</b>		<b>61</b>	<b>67,8</b>	<b>29</b>	<b>32,2</b>	

Tabel 6 menunjukkan responden dukungan pemerintah desa kategori kurang mendukung lebih banyak pada ada kepemilikan jamban (74,2%), daripada kelompok yang tidak ada kepemilikan jamban (25,8%). Hasil uji Chi Square menunjukkan ada hubungan dukungan pemerintah desa terhadap kepemilikan jamban dengan signifikansi 0,046 ( $\alpha = 0,05$ ).

## PEMBAHASAN

### Analisa Univariat

#### Tingkat Pengetahuan di Wilayah Pesisir Wilayah Kerja Puskesmas Elpaputih

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pengetahuan yang baik sebanyak 89 responden (98%). Tingginya persentase tersebut menunjukkan bahwa program edukasi kesehatan yang dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Elpaputih telah berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dikaitkan dengan adanya penyuluhan kesehatan yang rutin, peran aktif tenaga kesehatan dalam memberikan informasi, serta dukungan dari tokoh masyarakat dalam menyebarkan pesan-pesan kesehatan. Pengetahuan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan perilaku sehat (Sari et al. 2025). Dengan hampir seluruh responden memiliki pengetahuan yang baik, maka potensi penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat relatif tinggi. Kondisi ini menjadi modal penting dalam upaya menurunkan angka kejadian penyakit berbasis lingkungan maupun perilaku, seperti diare, penyakit kulit, dan penyakit menular lainnya. Meskipun demikian, keberadaan 1 responden (1,1%) dengan pengetahuan kurang baik tetap perlu mendapat perhatian. Walaupun jumlahnya kecil, hal ini dapat menjadi indikator adanya kesenjangan akses informasi atau faktor sosiodemografi tertentu, seperti tingkat pendidikan, usia lanjut, pendapatan perilaku atau hambatan budaya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan khusus untuk menjangkau kelompok yang masih tertinggal agar tidak terjadi ketimpangan dalam penerimaan informasi kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditegaskan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat di wilayah pesisir, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Elpaputih, berada pada kategori baik. Mayoritas masyarakat telah memahami pentingnya kepemilikan jamban sebagai salah satu indikator perilaku hidup bersih dan sehat. Oleh karena itu, faktor pengetahuan tidak dapat dijadikan sebagai penyebab utama munculnya permasalahan kepemilikan jamban di wilayah tersebut. Temuan ini memperlihatkan bahwa hampir seluruh masyarakat telah memiliki kesadaran kognitif yang memadai mengenai urgensi penggunaan jamban sehat, sehingga hambatan yang terjadi lebih mungkin bersumber dari faktor lain, seperti aspek ekonomi, ketersediaan sarana, atau kondisi geografis wilayah pesisir. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Nanda et al. (2023) di Lingkungan 20, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, yang menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat yang baik tidak berpengaruh signifikan terhadap kepemilikan jamban ( $p=0,098$ ). Artinya, meskipun masyarakat memiliki pengetahuan yang tinggi, faktor lain di luar pengetahuan lebih menentukan dalam praktik kepemilikan jamban. Namun, temuan ini berbeda dengan penelitian

Hasanudin et al. (2024) di Desa Silanga, Kabupaten Parigi Mautong, yang menemukan adanya hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan dengan kepemilikan jamban ( $p=0,000$ ). Perbedaan hasil tersebut dapat dijelaskan oleh adanya variasi pola pikir dan konteks sosial budaya masyarakat pesisir. Pada beberapa wilayah, pengetahuan yang baik langsung mendorong perilaku kepemilikan jamban, sementara di wilayah lain, meskipun pengetahuan tinggi, perilaku tidak selalu mengikuti karena adanya faktor struktural dan kebiasaan yang telah mengakar.

### **Dukungan Pemerintah Desa di Wilayah Pesisir Wilayah Kerja Puskesmas Elpaputih**

Dalam pembangunan kesehatan di wilayah pedesaan, adanya dukungan dari pemerintah desa dianggap penting oleh masyarakat sehingga segala tindakan dan ucapannya akan mendapat perhatian dan diikuti oleh warganya. Agnesria, dkk (2024). Berdasarkan hasil analisis univariat, diperoleh gambaran bahwa dari seluruh responden, sebanyak 28 orang (31,1%) menyatakan bahwa dukungan pemerintah desa dalam kategori mendukung, sedangkan 62 orang (68,9%) menyatakan dukungan pemerintah desa dalam kategori kurang mendukung. Distribusi ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menilai dukungan pemerintah desa terhadap kepemilikan jamban masih berada pada kategori yang belum optimal. Dominannya kategori kurang mendukung mengindikasikan bahwa peran pemerintah desa dalam menodorong kepemilikan jamban belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena dukungan pemerintah desa terhadap kepemilikan jamban belum terimplementasi secara merata dan berkelanjutan, sehingga sebagian besar masyarakat menilai peran pemerintah desa masih kurang optimal dalam mendorong kepemilikan jamban.

Pemerintah desa dapat membuat peraturan desa (Perdes) yang mendorong kepemilikan jamban sebagai syarat rumah sehat. Penelitian oleh Nazira, dkk (2024) menunjukkan bahwa desa yang memiliki regulasi jelas tentang sanitasi memiliki persentase kepemilikan jamban lebih tinggi dibanding desa tanpa regulasi. Hal ini sejalan dengan temuan Wulansari, dkk. (2023) yang menyatakan bahwa regulasi desa mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong perubahan perilaku buang air besar sembarangan (BABS) menuju penggunaan jamban sehat. Menurut penelitian Fathonah, et.al (2024), rumah tangga yang menerima bantuan sarana dari pemerintah desa memiliki peluang lebih besar untuk memiliki jamban sehat. Bantuan ini sangat penting terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah. Pemerintah desa yang aktif melakukan monitoring melalui kader kesehatan dan aparat desa mampu mempertahankan perilaku sanitasi yang baik. Monitoring ini berupa pendataan rumah tanpa jamban, kunjungan rumah, evaluasi rutin program sanitasi. Hasil univariat ini menjadi dasar untuk analisis lanjutan, karena menunjukkan bahwa rendahnya dukungan pemerintah desa berpotensi menjadi faktor penghambat kepemilikan jamban.

### **Kepemilikan Jamban di Wilayah Pesisir Wilayah Kerja Puskesmas Elpaputih**

Kepemilikan jamban sehat merupakan indikator krusial dalam peningkatan kualitas kesehatan lingkungan. Jamban tidak sekadar berfungsi sebagai sarana pembuangan tinja, melainkan juga sebagai benteng utama dalam mencegah penularan penyakit berbasis lingkungan seperti diare, kecacingan, dan infeksi saluran pencernaan. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa kepemilikan jamban memiliki korelasi langsung dengan penurunan insidensi penyakit menular, sehingga dijadikan salah satu fokus prioritas dalam program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (Wirdawati & Dewi, 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 67,8% masyarakat pesisir wilayah kerja Puskesmas Elpaputih sudah memiliki jamban, sementara 32,2% lainnya belum. Kondisi ini menandakan masih adanya risiko praktik buang air besar sembarangan (BABS). Hal tersebut bukan disebabkan oleh rendahnya pengetahuan, melainkan faktor lain seperti keterbatasan ekonomi, kondisi geografis pesisir yang kurang mendukung, serta kebiasaan budaya dan perilaku yang sudah mengakar.

Dengan demikian, intervensi kebijakan perlu difokuskan pada penyediaan sarana, pemberdayaan masyarakat, dan perubahan norma sosial agar kepemilikan jamban dapat meningkat secara merata.

Saleh et al (2025) menekankan bahwa tenaga kesehatan berperan sebagai katalis perubahan perilaku. Program STBM terbukti efektif meningkatkan kepemilikan jamban melalui strategi penyuluhan, pendampingan, dan monitoring yang konsisten. Dukungan aktif dari petugas kesehatan memperbesar peluang keluarga untuk membangun jamban sehat karena masyarakat merasa lebih terpantau, termotivasi, dan terdorong untuk berpartisipasi menjaga kebersihan lingkungan. Pendekatan berbasis komunitas terbukti lebih unggul dibandingkan pendekatan individual karena mampu menumbuhkan rasa kepemilikan kolektif. Lebih jauh, Aulia et al (2025) menegaskan bahwa sanitasi lingkungan yang baik dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) berperan signifikan dalam menurunkan risiko diare. Oleh karena itu, masyarakat disarankan untuk menjaga kebersihan lingkungan, memastikan penggunaan jamban sehat, serta memperkuat praktik PHBS dengan dukungan edukasi berkelanjutan dari puskesmas dan pemerintah setempat.

### **Analisis Bivariat**

#### **Hubungan antara Tingkat Pengetahuan terhadap Kepemilikan Jamban di Wilayah Pesisir Wilayah Kerja Puskesmas Elpaputih**

Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa proporsi responden dengan tingkat pengetahuan baik terhadap kepemilikan jamban sangat dominan yaitu 98,9% (89 responden), sementara responden dengan tingkat pengetahuan kurang hanya sebesar 1,1% (1 responden). Hasil uji chi square dengan nilai signifikansi ( $p=0,678$ ). sehingga menunjukkan bahwa tidak ada hubungan bermakna antara tingkat pengetahuan terhadap kepemilikan Jamban. Hasil pola distribusi ini mengindikasikan adanya kecenderungan kuat bahwa kepemilikan jamban terkonsentrasi pada individu dengan tingkat pengetahuan yang memadai mengenai sanitasi dasar. Hal ini terjadi karena hampir seluruh responden memiliki tingkat pengetahuan yang baik sehingga variabel pengetahuan tidak lagi menjadi faktor pembeda yang signifikan, dan kepemilikan jamban lebih dipengaruhi oleh faktor lain di luar pengetahuan.

Secara konseptual, pengetahuan merupakan determinan kognitif utama dalam pembentukan perilaku kesehatan sebagaimana dikemukakan dalam teori perubahan perilaku, dimana aspek kognitif berperan sebagai faktor predisposisi dalam mendorong adopsi perilaku preventif (Gasper, 2025). Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasanudin, dkk (2024) tentang faktor pendidikan dan pengetahuan terhadap kepemilikan jamban di desa silanga kabupaten Parigi Moutong dengan hasil uji chi square nilai p-value ( $p=0,000$ ) yang menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pengetahuan terhadap kepemilikan jamban.

#### **Hubungan Dukungan Pemerintah Desa terhadap Kepemilikan Jamban**

Berdasarkan hasil tabulasi silang antara dukungan pemerintah desa dengan kepemilikan jamban, diketahui bahwa pada kelompok responden yang menyatakan adanya dukungan pemerintah desa, dari total 28 orang, sebanyak 15 (53,6%) memiliki jamban, sedangkan 13 orang (46,4%) tidak memiliki jamban. Sementara itu pada kelompok responden yang menyatakan kurangnya dukungan pemerintah desa, dari total 62 orang, sebanyak 46 orang (74,2%) memiliki jamban, sedangkan 16 orang (25,8%) tidak memiliki jamban. Hasil uji chi square dengan nilai p-value ( $p=0,046$ ) ini menunjukkan adanya hubungan antara dukungan pemerintah desa terhadap kepemilikan jamban. Hal ini terjadi karena adanya faktor kemandirian Masyarakat, warga yang merasa tidak mendapat bantuan dari pemerintah cenderung melakukan pengadaan jamban secara mandiri karena dorongan kebutuhan Kesehatan keluarga.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Agnesria dkk. (2021) yang juga menemukan adanya hubungan antara dukungan pemerintah desa dan kepemilikan jamban ( $p=0,029$ ). Namun, hasil penelitian di Puskesmas Elpaputih memperlihatkan dinamika yang lebih kompleks, dukungan pemerintah desa tidak selalu berbanding lurus dengan kepemilikan jamban. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan struktural dari pemerintah desa perlu dioptimalkan agar benar-benar efektif. Dukungan yang bersifat formal atau administratif saja tidak cukup, harus ada pendekatan publik yang inovatif, misalnya melalui program pemberdayaan, insentif pembangunan jamban sehat, serta penegakan aturan yang melarang praktik buang air besar sembarangan. Selain itu, faktor perilaku, budaya dan norma sosial juga berpengaruh. Di beberapa masyarakat pesisir, praktik BABS masih dianggap wajar sehingga meskipun ada dukungan pemerintah, perilaku tidak serta-merta berubah. Oleh karena itu, dukungan pemerintah desa harus disertai dengan strategi perubahan perilaku yang menekankan pentingnya jamban sebagai kebutuhan dasar, bukan sekadar fasilitas tambahan. Pemerintah desa juga perlu membangun kesadaran kolektif dan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan sanitasi, sehingga tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap kesehatan lingkungan (Wirdawati & Dewi. 2021).

Sonia, Hidayati, & Reskiaddin (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa desa dengan dukungan pemerintah yang aktif memiliki tingkat kepemilikan jamban jauh lebih tinggi dibandingkan desa dengan dukungan yang minim. Hal ini membuktikan bahwa intervensi pemerintah desa menjadi faktor kunci dalam mempercepat pencapaian akses sanitasi layak. Dukungan tersebut dapat berupa penyuluhan, fasilitasi pembangunan jamban, pemberian bantuan material, maupun regulasi yang mendorong masyarakat untuk meninggalkan praktik buang air besar sembarangan. Selain itu penelitian yang dilakukan Rachmawati et.al (2019) menunjukkan bahwa dukungan kader kesehatan dan pemerintah desa memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kepemilikan jamban di masyarakat pesisir. Hal ini disebabkan oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir yang relatif rendah, sehingga kemampuan mereka untuk membangun jamban secara mandiri terbatas. Dalam situasi seperti ini, keberadaan dukungan pemerintah desa menjadi faktor penentu yang mendorong perubahan perilaku. Dukungan tersebut tidak hanya berupa bantuan material, tetapi juga dalam bentuk pendampingan kader, penyuluhan, serta regulasi desa yang menekan praktik buang air besar sembarangan (BABS). Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kepemilikan jamban tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah desa, tetapi juga pada kemandirian, kesadaran kesehatan, serta norma sosial masyarakat. Dukungan pemerintah desa akan lebih relevan dan tajam apabila diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, inovasi kebijakan, dan penegakan aturan yang mampu mengubah kebiasaan lama menuju perilaku hidup bersih dan sehat.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat pengetahuan masyarakat pesisir di wilayah kerja Puskesmas Elpaputih tergolong sangat baik (98,9%), kepemilikan jamban sehat masih belum merata. Sebanyak 67,8% keluarga telah memiliki jamban, namun 32,2% lainnya masih berpotensi melakukan praktik buang air besar sembarangan. Faktor yang paling berpengaruh bukanlah pengetahuan masyarakat, melainkan dukungan pemerintah desa. Mayoritas responden menilai dukungan pemerintah desa dalam penyediaan fasilitas dan edukasi masih kurang (68,9%), dan hal ini terbukti memiliki hubungan signifikan dengan kepemilikan jamban ( $p = 0,046$ ), sementara tingkat pengetahuan tidak menunjukkan hubungan yang berarti ( $p = 0,678$ ).

## UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada dosen pembimbing atasa bimbingan dan dukungan yang telah diberikan selama proses penelitian. Peneliti juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada pimpinan puskesmas elpaputih beserta staf karena sudah memberikan izin dan kesempatan bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Apresiasi yang tak terhingga kepada seluruh responden yang telah berpartisipasi dan bersedia memberikan informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agnesria, Maria, Bambang & Caca. (2024). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepemilikan Jamban di Kelurahan Bunta II, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai Tahun 2021. *Buletin Kesehatan Mahasiswa*, vol. 2, No.2. 82-83.
- Agustyaningsih, Kurnia, & Larasati. (2020). Hubungan pengetahuan tentang jamban sehat dan lingkungan fisik dengan perilaku buang air besar sembarangan. *Dunia Keperawatan: Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan*, 8(2), 130-139.
- Aulia, Dhewi, Ariyanto & Fauzan. (2025). Hubungan Kepemilikan Jamban Sehat, Sumber Air Bersih dan Personal Hygiene dengan Kejadian Diare di Kelurahan Kelayan Selatan Kota Banjarmasin Tahun 2025. *Health Research Journal of Indonesia*, 4(1), 17–23.
- Boys. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepemilikan Jamban Keluarga (Doctoral dissertation, Poltekkes Kemenkes Kupang).
- Direktorat Penyehatan Lingkungan. (2024). Pedoman Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Revisi 1. Kementerian Kesehatan RI
- Gargita. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemilikan jamban setelah pemicuan stbm di desa pantolobete wilayah kerja puskesmas Lalundu Despot Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 3(5), 223-231.
- Gasper, Arna, Siagian, Ponidjan, Nurmawi, Rosmawati & Kristiani. 2025). Ilmu Perilaku Kesehatan. Cetakan Pertama. PT. Media Pustaka Indo.
- Hasanudin, Amsal, Saharudin. (2024). Faktor Pendidikan dan Pengetahuan Terhadap Kepemilikan Jamban di Desa Silanga Kabupaten Parigi Mautong. *Jurnal Promotif Prefentive*. Vol.7. no.6. 1152-1158.
- Mila, Aryana & Rusminingsih. (2023). Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Kepala Keluarga Dengan Kepemilikan Jamban Sehat. *Jurnal Kesehatan Lingkungan (JKL)*, 13(1), 14-27.
- Mukhlisin & Solihudin. (2020). Kepemilikan Jamban Sehat Pada Masyarakat. *Faletehan Health Journal*, 7(03), 119-123.
- Nahrin, Kuswary & Nur. (2024). Knowledge Role of Officers Role of Government on Family Latrine Ownership in Patilereng Village Working Area of Bontosikuyu Health Center Kab. Kep. Selayar. *Jurnal Data Kesehatan Indonesia*, 2(2).
- Nanda, Nasution, Rizqika, Munthe & Febrina. (2025). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepemilikan Jamban Keluarga Di Kampung Nelayan Kelurahan Belawan I. *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan*, 12(5).
- Nihaya, Wulandari & Sugiono. (2024). Peran pemerintah desa membalong dalam keberhasilan implementasi program stop buang air besar sembarangan di desa membalong kecamatan membalong kabupaten belitung. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 11(2), 403-424.
- Pranaka, R. N., & Agustinus, E. (2022). Faktor Karakteristik Kepala Keluarga yang Berhubungan dengan Kepemilikan Jamban di Desa Bengawan Ampar Kabupaten Landak. *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*, 32(1), 65-76.

- Puskesmas Elpaputih. (2024). Laporan Sanitarian Puskesmas Elpaputih tahun 2024. Elpaputih: Puskesmas Elpaputih.
- Putri, Hubaybah, Fitri, Aswin, Hidayati & Hidayat. (2024). Analisis Pilar Pertama pada Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Wilayah Kerja Sungai Lokan Tanjung Jabung Timur. *Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/BB Medan*, 8(2), 166-172.
- Rachmawati, Margawati & Laksono. (2019). Dukungan kader dan kepemilikan jamban pada penduduk pesisir di Koba Bangka Belitung. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 35 (5), 163-168.
- Safriani & Putri. (2020). Promosi Manfaat Jamban dan Tangki Septik Serta Peningkatan PHBS di Desa Lueng Baro Kabupaten Nagan Raya. *Ethos: Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 8(1), 33-40.
- Saleh, Yudianti, Damayati, Basri & Amansyah. (2025). Evaluasi Peran Kepemilikan Jamban dalam Kejadian Stunting: Temuan dari Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 24(1), 101-108.
- Sari, Ningsih, & Sudirham. (2025). Edukasi Pentingnya Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada Anak Sekolah Dasar GP Tombasian Atas. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 7(2), 129-136.
- Sari. (2020). Intensi Kepada Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Penggunaan Jamban Sehat Di Kelurahan Bukik Cangang KAYu Ramang Bukit Tinggi. *Sari, Mila*, 1(2), 116–124.
- Sonia & Hidayati. (2023). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepemilikan Jamban Sehat di Desa Kerta Dewa Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Kesmas Jambi*, 7(2), 90-101.
- Susilawati, Darmayanti, Falef & Hanafi. (2023). Community-Based Sanitation Management Model Using Local Aspects of Coastal Areas.
- Tiak, Kanan, Dwicahya & Sudarsa. (2024). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepemilikan Jamban di Kelurahan Bunta II Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Tahun 2021: Factors influencing latrine ownership in Bunta II Village, Bunta District, Banggai Regency in 2021. *Buletin Kesehatan Mahasiswa*, 2(2), 78-84.
- Widyastuti, Jamaluddin, Arisanti & Kartiasih. (2023, October). Analisis Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Akses Sanitasi Layak di Indonesia Tahun 2021. In *Seminar Nasional Official Statistics (Vol. 2023, No. 1, pp. 105-116)*.
- Wijayanti & Maulana. (2019). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepemilikan Jamban Sehat Di Dusun Tanggungrejo Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. *Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan*, 1(1), 1-15.
- Wirdawati & Dewi. (2021). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepemilikan Jamban Sehat di Desa Penyak Lalang Kabupaten Sintang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 16(3), 177-181.